

FINTECH DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERTANIAN DI BANTEN***Fintech and Collaborative Governance at Farming in Banten*****Gilang Ramadhan**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail : gil.pas2000@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL**ABSTRAK***Article history:*

Dikirim Tgl. : 18 Mei 2020

Revisi Pertama Tgl. : 23 Mei 2020

Diterima Tgl. : 12 Juni 2020

Kata Kunci :*Collaborative Governance;**Fintech; Petani Muda***Keywords :***Collaborative Governance;**Fintech; Young Farmers*

Artikel ini bertujuan untuk melihat bentuk kolaborasi dalam memajukan Pertanian di Banten. Kajian menunjukkan penurunan generasi, hal ini disebabkan sektor pertanian bukanlah hal yang menarik untuk dilirik oleh kalangan muda, setidaknya lebih dari 80% petani di Indonesia berusia lebih dari 50 tahun dan umumnya tidak berpendidikan tinggi. Banyak aktor di Banten yang berupaya menginisiasi munculnya pertanian model baru yang dapat menarik anak muda, maka konsep *collaborative governance* dipakai untuk melihat fenomena ini. Khususnya bagaimana peran *fintech* sebagai sektor swasta dalam membantu memunculkan dan memberdayakan petani muda di Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran *fintech* dalam kemunculan pertanian yang dijalankan anak muda di Banten serta yang menjadi tantangannya (*system context*) dalam *collaborative governance*. Hasil dari penelitian ini masih terjadi tumpang tindih peran antara sektor publik, swasta dan masyarakat, bahkan *fintech* mengaku seperti dihalangi oleh pemerintah, kemudian pembagian peran antar aktor masih belum dapat dirasakan dalam kasus ini.

Abstract

This article aims to study the forms of collaboration in the development of Agriculture in Banten. Studies show a generation decline, this is because the agricultural sector is not an interesting thing to look at by young generation, at least more than 80% of farmers in Indonesia are more than 50 years old and are generally not highly educated. Many actors in Banten are trying to initiate the emergence of a new model of agriculture that can attract young generation, so the concept of collaborative governance is used to see this phenomenon. Specifically how the role of fintech as the private sector in helping to emerge and empower young farmers in Banten. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, this is used to illustrate how the role of fintech in the emergence of agriculture run by young people in Banten as well as the challenges (system context) in collaborative governance. The results of this study are still overlapping roles between the public, private and community sectors, even fintech claimed as obstructed by the government, then the division of roles between actors is still not felt in this case.

A. PENDAHULUAN

Belakangan ini banyak berkembang inovasi keuangan menyusul revolusi industri 4.0, inovasi keuangan menysasar ke banyak industri termasuk pertanian. Pertanian merupakan sektor industri yang memainkan peranan penting di Indonesia

yang dilakoni masyarakat, BPS pada tahun 2018 mencatat ada 35,7 juta orang atau 28,79 persen masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, data ini tentu dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang menysasar industri pertanian sebagaimana tergambar dalam tabel 1.

Salah satu lembaga keuangan yang ikut menyasar industri pertanian adalah *fintech* atau financial technology, atau lembaga keuangan yang berbasis IT. Sayangnya *fintech* hanya bisa menjangkau petani-petani muda yang sudah mengenal dunia teknologi, dan profesi bertani belum banyak digandrungi oleh pemuda. Lebih dari 80% petani di Indonesia berusia lebih dari 50 tahun dan umumnya tidak berpendidikan tinggi (Petani Muda, 2019). Kebutuhan akan regenerasi petani tidak didukung dengan minimnya pemuda yang berada di sektor pertanian karena sebanyak 70% pemuda menganggap menjadi petani padi adalah hal yang tidak menarik. Lebih lanjut sebanyak 46% pemuda yang akhirnya menjadi petani padi karena didorong oleh orang tuanya dan 26% karena tidak ada pekerjaan lain (Tirto, 2019).

Tabel 1.
Penduduk Banten Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian

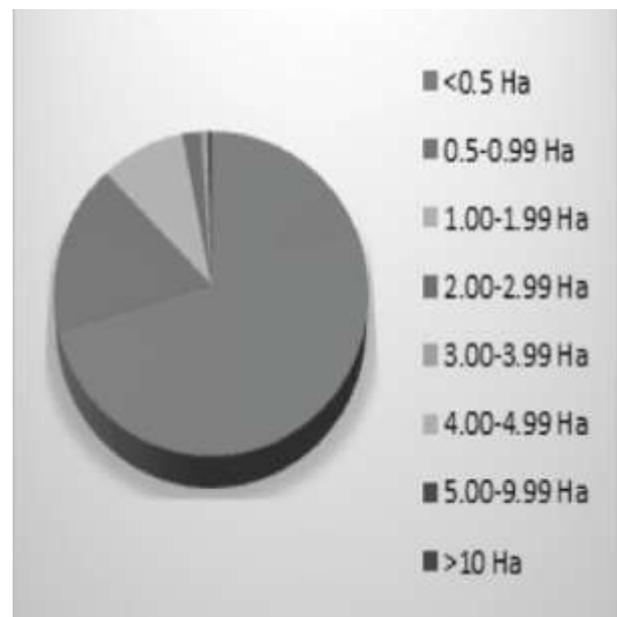
Golongan Umur	2011	2012	2013	2014
15-19	27886	24122	15856	12701
20-24	40300	28015	29152	23941
25-29	67228	53401	60861	45146
30-34	51971	76291	69820	63276
35-39	74235	70323	77468	65047
40-44	100027	79508	112917	84948
45-49	72042	76326	80870	69948
50-54	69965	78697	91768	92972
55+	126468	116176	156474	147019
Jumlah	630122	602859	695186	604998

Sumber : BPS Banten 2016 (BPS Provinsi Banten, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh LIPI pada sejumlah daerah di Jawa Tengah yang meliputi wilayah Sragen, Klaten, dan Sukoharjo menggambarkan terjadinya keengganan terhadap regenerasi petani disebabkan karena arus modernisasi. Modernisasi berpengaruh terhadap

mobilitas penduduk usia muda pedesaan melalui fenomena migrasi ke perkotaan yang menjadi penyebab ditinggalkannya pertanian skala kecil di pedesaan. Pemuda sebagai penerus yang diharapkan dapat menjadi petani di masa datang tidak memiliki keterampilan pertanian yang diteruskan dari orang tua atau komunitas masyarakatnya. Terdapat perubahan pada keluarga, sekolah, sawah, aktivitas non pertanian yang justru mengasingkan mereka dari lingkungan tempat hidupnya (lipi.go.id, 2015).

Temuan penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa ketertarikan kalangan muda untuk menjadi petani sangat rendah? diantara penyebabnya adalah gambaran sebagai petani adalah profesi dengan penghasilan yang rendah. Dari beberapa diskusi yang dilakukan oleh beberapa petani dapat disimpulkan bahwa profesi petani, khususnya petani padi adalah profesi yang tidak menjanjikan. Menjadi petani baru akan mencapai tingkat keekonomian yang menjanjikan jika luasan tanah garapan lebih dari 2 Ha. Akan tetapi justru data pertanian di Banten menunjukkan mayoritas petani hanya memiliki lahan kurang dari 0.5 Ha yang berarti petani gurem (Hamid, Nurrohman, Hikmawan, & Ramadhan, 2020).



Gambar 1
Jumlah Rumah Tangga Pertanian Berdasarkan Luas Lahan di Banten

Sumber : Hasil Sutas Pertanian BPS Provinsi Banten 2018 (BPS Provinsi Banten, 2018)

Tabel 2
Jumlah Pertanian di Banten

No	Kabupaten/ Kota			
		2003	2013	2018
1	Pandeglang	188	151	133
2	Lebak	203	187	198
3	Tangerang	222	86	90
4	Serang	190	127	128
5		19	8	6
6	Cilegon Kota	16	8	11
7	Serang Kota	30	20	24
8	Tangerang Selatan Kota	21	5	6
		892	592	596

Sumber : Data Sensus Pertanian BPS Provinsi Banten tahun 2013; Sutas Pertanian BPS Banten Tahun 2018 (BPS Povinsi Banten, 2013)

Dari sekitar 71% rumah tangga petani dalam gambar 1 hanya memiliki luas lahan seluas 71%. Hanya sebanyak 17% dari rumah tangga petani yang menguasai lahan seluas 0.5 sampai 0.99 Ha, diikuti hanya sebanyak 9.15% rumah tangga yang memiliki luas tanah 1 sampai 1.99 Ha, dan sisanya hanya 2% rumah tangga yang memiliki luas lahan 3 sampai 3.99 Ha.

Pemerintah berupaya untuk mendorong industri pertanian dengan berbagai program untuk menarik minat khususnya petani muda, yaitu program petani milenial yang menyasar petani dengan kisaran usia 19-39 tahun. Salah satu syarat yang harus dimiliki adalah tanggap terhadap dunia informasi digital, tanggap alsintan, dan memiliki lahan. Selain itu juga ada program asuransi pertanian untuk meringankan beban petani yang mengalami gagal panen, petani hanya membayar sebesar Rp 35.000 untuk mendapatkan tanggungan senilai Rp 4.000.000. akan tetapi dari program-program yang digelontorkan oleh pemerintah belum dapat menarik petani muda secara signifikan karena alasan pendanaan.

Permasalahan lahan pertanian yang kritis yang kini dihadapi khususnya oleh warga Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tergambar dalam tabel 2, diikuti dengan persepsi tidak mungkin untuk melakukan pertanian pada wilayah urban yaitu lahan perkotaan yang terkenal sempit dan kotor. Padahal aktifitas pertanian pun dapat dilaksanakan di daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas dengan metode *urban farming*. (Junainah, W., Kanto, S., 2016).

Fintech atau *Financial Technology* merupakan penggunaan teknologi dalam bidang keuangan dengan menggunakan teknologi perangkat lunak, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. berkembang pesatnya *fintech* karena banyaknya masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh industry keuangan tradisional. hal ini terkait dengan perbankan yang masih terikat aturan yang ketat dan keterbatasan industry perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

Fintech sendiri terbagi ke dalam beberapa bentuk dasar, diantaranya adalah sector keuangan (perbankan, investasi, asuransi, dan lain-lain), proses bisnis yang dialaminya (pembayaran, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan lain-lain), segmen konsumen (eceran atau perusahaan), atau berdasarkan bentuk interaksinya (*business to business, bussinesds to costumer, costumer to customer*) Alt, R, & puscmann, T., 2012 dalam (Avisha, Charina, Noor, & Mukti, 2019).

Banyaknya permasalahan terkait dengan industri pertanian menjadi tantangan tersendiri bagi industri *fintech* yang mencoba untuk merambah industri pertanian yang menjanjikan sekaligus penuh tantangan. Sebagai salah satu dari komponen yang memainkan peranan penting di masyarakat, selain Pemerintah dan kelompok masyarakat, *fintech* juga diharapkan memiliki andil dalam memajukan industri pertanian sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melihat peran *fintech* agri yang memiliki pengaruh terhadap berkembangnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian, maka tujuan tulisan ini ingin menggali lebih dalam peran *fintech* dalam dunia pertanian khususnya di Banten.

B. LANDASAN TEORITIS

Pembahasan pertama adalah konsep *financial technology* atau yang lebih dikenal dengan *fintech*, tulisan yang berjudul *Disrupting Finance Fintech and Strategy in The 21st Century* dari Teo Lynn dan kawan-kawan " (Lynn, Theo, John G. Mooney, Pierangelo, Rosati, 2019) mengenalkan konsep *crowd funding* yang merupakan konsep baru dalam dunia keuangan. Platform ini merepresentasikan dua hal, yaitu pengusaha/pengelola yaitu orang yang memiliki ide untuk mengelola keuangan masyarakat dan yang kedua adalah investor adalah penanam modal yang berasal dari masyarakat. Platform ini merupakan kesempatan bagi pengusaha/pengelola dana untuk mengetes pangsa pasar dan mendapatkan sugesti dari masyarakat mengenai suatu proyek. Jika pengusaha tersebut tidak berhasil mendapatkan dana dari masyarakat, selain akan kesulitan untuk menerima investasi, kemungkinan juga akan kehilangan ide-idenya karena dicuri pesaingnya.

Pihak lain dalam platform ini adalah pemodal, yang melakukan *crowdfunding* sebagai bentuk dukungan atas ide-ide dan inovasi yang diusulkan oleh pengusaha yang akan mengelola dana. Selain untuk mengadakan pengumpulan dana, para pemodal ikut bergabung dalam suatu proyek *crowdfunding* kadang bertujuan ingin tergabung dalam sebuah komunitas tertentu yang memiliki mimpi dan tujuan yang sama. *Industry fintech* dibangun dengan inovasi yang membedakan dengan *industry* keuangan konvensional, karenanya inovasi dan ide-ide baru sangat diperlukan dalam *industry* ini sehingga yang terjadi adalah persaingan gagasan antara sesama lembaga keuangan berbasis *fintech*.

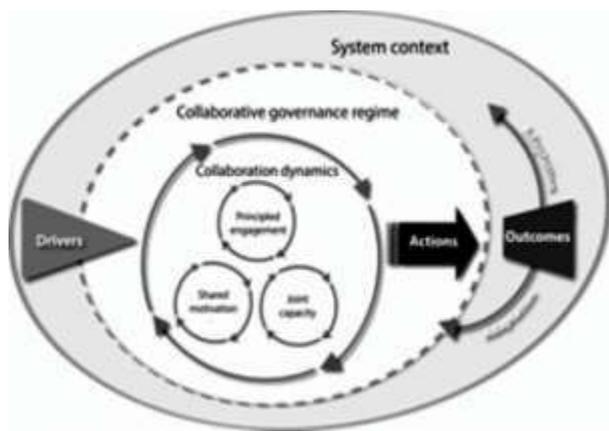
Tidak kalah penting sebagai penyokong dana dari *fintech* merupakan komunitas-komunitas yang saling terhubung satu sama lain. Relasi jejaring memberikan proporsi yang lebih besar terhadap pinjaman, lebih besar ketimbang yang berasal dari luar komunitas atau orang asing. Penelitian berkesimpulan bahwa investor yang berasal dari komunitas yang terikat dengan pengusaha tersebut

akan merespon permintaan pinjaman sekitar 59.5% lebih cepat ketimbang orang yang berada di luar komunitas. Karenanya lembaga *fintech* biasanya sangat memegang tinggi kepercayaan komunitas sebagai basis *funding* mereka.

Pembahasan selanjutnya mengenai *collaborative governance* yang pertama berasal dari tulisan yang berjudul *Collaborative Governance Regimes* dari Kirk Emerson dan Tina Nabatchi, *collaborative governance* pertama kali muncul saat ada pemisahan antara Negara dengan masyarakat, kemudian dikembangkan konsep birokrasi dan hirarki (Emerson, Kirk and Nabatchi, 2015) pada pertengahan abad ke 20 kemudian ada pemisahan struktural antara sektor publik dan privat. kemudian berbagai organisasi yang berbeda dari sektor publik dan privat memulai bekerja sama melampaui batas-batas institusi dan sektoral, sehingga perbedaan antara sektor publik, privat, dan lembaga non profit menjadi lebih tipis, dan hirarki antar sektor kini lebih mudah ditembus (Kettle 2006, Emerson 2015).

Emerson dan Nabatchi (Emerson, Kirk and Nabatchi, 2015) menawarkan definisi yang integratif tentang *collaborative governance* yaitu sebuah program dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang memungkinkan orang untuk terlibat melintasi batas. selain itu juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai rezim *collaborative governance* yang berupa system pengambilan keputusan publik melibatkan kolaborasi lintas batas yang mewakili pola-pola yang ada dari perilaku dan aktivitas.

Untuk menggambarkan proses dan komponen-komponen yang terlibat Emerson dan Nabatchi (Emerson, Kirk and Nabatchi, 2015) menggambarkan sebuah kerangka kerja integratif yang berbentuk oval, sebagai kritik atas tulisan mereka sebelumnya yang berbentuk lingkaran bergerigi yang dianggap tidak dinamis dan terkesan kaku, tidak bisa menggambarkan bagaimana alur pengaruh dan mempengaruhi dari apa yang disebut *drive* di dalam kerangka *collaborative governance*.



Gambar 2.
Kerangka Kerja Integratif Collaborative Governance

Sumber : (Emerson, Kirk and Nabatchi, 2015)

Gambar 2 memperlihatkan bagaimana lingkup collaborative ditampilkan berbentuk oval (yang melambangkan multidimensi) mewakili system konteks yang umum, CGR, dan dinamika kolaborasi internal dan aksi-aksi. sedangkan oval terluar digambarkan garis-garis padat dan gelap mewakili konteks system konteks yang melingkupi, yang meliputi politik, hukum, sosial ekonomi, lingkungan, dan pengaruh lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh CGR. dari konteks ini setidaknya ada empat driver penting, yang digambarkan sebagai triangular di sudut kiri, termasuk factor ketidakpastian, ketergantungan, konsekuensi, dan pemilihan kepemimpinan. driver ini membantu menginisiasi CGR, yang diwakili oleh oval kedua dengan garis putus-putus dan mengatur arah dari awal.

Kemudian di lingkup yang paling dalam dari oval tersebut ada *collaboration dynamics*, yang direpresentasikan dari tiga dinamika yang saling berinteraksi ; keterlibatan principal, motivasi bersama, dan kapasitas untuk mengikuti aksi. partisipan membentuk tujuan kolektif yang menuntun kepada aksi kolaboratif dari CGR. aksi tersebut melangkah ke outcomes, dimana dimungkinkan untuk beradaptasi ditengah system konteks dari CGR sendiri.

Tulisan kedua berjudul Collaborative Governance in Theory and Practice dari Cris Ansell dan Alison Gash. tulisan ini menggunakan meta-analytic study dimana penulis menggunakan

strategi yang dinamakan “successive approximation”. Ansell dan Gash (Ansell, Cris and Gash, 2007) mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar Negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola asset dan program publik.

Definisi ini menekankan enam hal penting (1) forum diinisiasi oleh institusi publik, (2) partisipasi di dalam forum termasuk actor-aktor di luar negara, (3) partisipasi terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan dan bukan sebatas konsultasi dengan lembaga publik, (4) forum secara formal diorganisasikan dan bertemu secara kolektif, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan apabila konsensus tidak tercapai dalam kenyataan), dan (6) fokus dari adanya kolaborasi adalah dalam kebijakan publik atau manajemen publik. definisi ini diakui oleh penulisnya sebagai definisi yang ketat dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain yang mengangkat tema collaborative governance.

Dalam tulisan ini Ansell dan Gash (Ansell, Cris and Gash, 2007) membuat model collaborative governance yang dibagi menjadi beberapa situasi, seperti *starting conditions* yang menggambarkan bagaimana insentif untuk partisipasi sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan konflik kemudian berlanjut pada tahap *collaborative process* yang dipengaruhi oleh desain dari institusi (*institutional design*) dan factor kepemimpinan termasuk factor pemberdayaan, yang akhirnya akan melahirkan sebuah outcome suatu kebijakan publik.

Tulisan yang ketiga berjudul An Integrative Framework for Collaborative Governance yang ditulis oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh. tulisan ini mensintesis dan memperluas rangkaian kerangka kerja konseptual dari collaborative governance, dimana penulis menggambarkan dimensi dari kerangka kerja tersebut sebagai sebuah sarang (*nest*) yang mencakup konteks system yang lebih besar, yaitu rezim collaborative governance atau disingkat sebagai CGR, serta dinamika kolaboratif internal

dan tindakan yang dapat menghasilkan dampak dan adaptasi dari seluruh system. kerangka kerja ini menyediakan peta konseptual yang luas yang menempatkan dan mengeksplorasi komponen system tata kelola lintas batas yang berkisar dari kebijakan atau program yang didasarkan kerjasama antar pemerintah untuk kolaborasi regional berbasis tempat dengan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk kemitraan publik-swasta.

Pada tulisan ini mendefinisikan collaborative governance sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan publik dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif melintasi batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan/atau publik, privat dan ruang sipil untuk membawa urusan publik yang tidak dapat tercapai (Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina and Balogh, 2011).

Inti dari tulisan ini ingin menggambarkan suatu kerangka kerja yang merepresentasikan Collaborative Governance Regime (CGR) yang menjadi teori utama dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011). digambarkan sebuah balok yang merepresentasikan system konteks yang melingkupi pengaruh politik, hukum, sosial ekonomi, lingkungan dan lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh CGR. dari system ini muncul sebuah pendorong (drivers) yang meliputi kepemimpinan, insentif konsekuensial, ketergantungan, dan ketidakpastian dan hal ini menetapkan arah kepada CGR.

Di dalam kotak tersebut terdapat koponen *collaborative dynamics* yang direpresentasikan bola bergigi yang terdiri dari tiga kompenen yang saling berinteraksi yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. interaksi dari ketiga komponen ini kemudian mendorong adanya sebuah *collaborative action* atau langkah yang diambil untuk mengimplementasikan tujuan bersama dari CGR tersebut.

Dari ketiga tulisan diatas dapat ditemukan beberapa perbedaan, yaitu dalam tulisan Emerson dan Nabatchi (2015) dan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011). pada tahun 2011 sistem konteks, CGR, dan *collaboration dynamics* digambarkan sebagai kotak yang disebut sebagai sarang. kemudian ditahun 2015 digambarkan sebagai sebuah oval yang didalam *collaboration dynamics*

terdapat perubahan dimana factor-faktornya tidak digambarkan sebagai suatu roda bergerigi, melainkan suatu lingkaran yang mengalir. kemudian pada 2011 di akhir proses dari dinamika kolaborasi dituliskan impact, tetapi pada 2015 sebagai hasil dituliskan sebagai outcomes. selain perbedaan terminology di dalam kerangka kerja tersebut sebenarnya dalam tulisan Emerson dan Nabatchi pada tahun 2015 ingin menggambarkan bahwa CGR merupakan proses yang dinamis dan tidak kaku seperti yang digambarkan pada tahun 2011. selain itu factor adaptasi menjadi penting untuk diperhitungkan karena akan kembali kepada proses awal yang melingkupi pengaruh politik, hukum, sosial ekonomi, lingkungan dan lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh CGR dan seterusnya menjadi suatu siklus.

Tidak seperti tulisan Emerson dan Nabatchi (2015) yang tidak memfokuskan harus pemerintah/ lembaga publik yang menjadi inisiator dari collaborative governance tulisan Ansell dan Gash (2007) menekankan harusnya lembaga publik yang menjadi inisiator dari forum collaborative governance. Penulis dalam hal ini memiliki perbedaan dari ketiga tulisan di atas, penelitian ini akan melihat bagaimana *fintech* sebagai swasta yang menjadi pendorong dari adanya kolaborasi antar pemerintah dan kelompok masyarakat, dan peran swasta (*fintech*) ini mendorong *stakeholder* lainnya untuk memainkan peran dalam kerangka industri pertanian di Banten.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk dapat menggali fenomena dan dinamika sosial kemudian data dianalisis secara induktif mulai dari mengupas bagaimana peran *fintech* dalam pertanian di Banten yang bersifat khusus hingga ke permasalahan yang sifatnya umum seperti bagaimana kerjasama/kolaborasi *fintech* dengan sector lain seperti pemerintah dan kelompok masyarakat, serta upaya penulis untuk menafsirkan setiap data yang didapatkan. (Creswell, 2015).

Penelitian dimaksudkan untuk menggali secara mendalam bagaimana peran *fintech* dalam

pertanian di Banten, dari memetakan pertanian yang prospektif untuk diberikan dana, hingga menemukan model pertanian yang baru yang dapat membuat perputaran finansial menjadi lebih efisien dari model pertanian yang lama, serta bagaimana *fintech* menjadi bagian dari kolaborasi dengan pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya memajukan pertanian di Banten dan mewujudkan ketahanan pangan.

Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dengan informan *fintech* yang berada di Banten khususnya *Agraria Farm* yang sudah membidani lahirnya beberapa petani-petani muda yang prospektif di Banten, informan yang kedua adalah Dinas Pertanian Provinsi Banten. Agar data yang didapatkan lebih lengkap dan menyeluruh, metode observasi juga digunakan dalam penelitian ini. Informan yang dipilih harus memiliki kualifikasi penguasaan data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007).

Triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini dengan membandingkan beberapa data. Yaitu data yang diperoleh dari *fintech Agraria Farm* dengan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai pelaku *collaborative governance* pada pertanian di Banten, selain itu peneliti juga mengelaborasi dengan data—data dari penelitian-penelitian lain yang meneliti tentang pertanian di Banten agar tercapai data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. PEMBAHASAN

Konsep *collaborative governance* berupaya untuk memadukan berbagai sector yang memiliki kepentingan yang sama untuk bekerja bersama. Ada beberapa pemain yang berperan dalam industry pertanian di Banten, namun tidak banyak yang melirik *fintech* sebagai pemain penting karena saat ini masih menyasar jumlah yang kecil dari industry pertanian tetapi memiliki prospek yang besar di masa yang akan datang.

Driver (Aktor penggagas)

Untuk menggambar bagaimana *collaboration dynamics* yang berjalan di Banten, akan dilakukan pendekatan kepada beberapa actor yang berperan dalam skema ini, **aktor pertama** dari

sector publik adalah pemerintah, **aktor kedua** dari sector privat adalah *fintech*, dan **aktor ketiga** adalah kelompok masyarakat yaitu Agis dan kawan-kawan. Ketiga aktor tersebut saling bertemu (*principe engagement*) bertemu dalam isu dan kepentingan yang sama, yang disebut sebagai tujuan kolektif. Akan tetapi dalam tulisan ini akan lebih ditonjolkan *engagement* dari sector privat dengan kelompok masyarakat.

Engagement antara sector privat dengan kelompok masyarakat terwujud dalam hubungan antara *Jawara Farm* yang memakai jasa *fintech Agraria Farm* sebagai penyokong keuangan. Bagaimana *fintech* ini melihat posisi pertanian sebagai bisnis, platform pertanian, bagaimana petani-petani muda ini sudah dibidik juga oleh *fintech* untuk keperluan pendanaan.

Agraria Farm sebagai perusahaan *Fintech* tidak dikelola dengan basis fulltime dari orang-orang yang berperan di dalamnya, melainkan hanya dikelola secara freelance oleh empat anak muda yang tidak berlatar belakang dari pendidikan ekonomi. Namun untuk mengoperasionalkan *fintech* tidak hanya mengandalkan naluri berbisnis, melainkan harus juga mengerti alur pertanian seperti bagaimana cara memberi makan sapi, dan semua anggota *agraria farm* memiliki kompetensinya masing-masing. Untuk kolaborasi atau invest dengan petani, *agraria farm* memberlakukan system bagi hasil yaitu 60:40, untuk petani 60 persen dan untuk investor 40 persen. Dari *Firmtek* sendiri merasa belum merasa mengabil untung, karena focus mereka untuk memperbanyak user/nasabah lebih dulu. Modal pertama yang dipakai oleh *agraria farm* untuk membangun usaha di industry *fintech* sebesar dua ratus juta rupiah yang bersumber dari pihak ketiga. Semua dana investasi untuk membangun *agraria farm* bersumber dari dana eksternal yang dipercayakan kepada mereka tanpa ada jaminan apapun, dan hanya mengandalkan kepercayaan. Padahal *agraria farm* saat berdirinya belum berbentuk badan usaha, dan hanya mengandalkan suatu konsep bisnis yang lebih dikenal sebagai system saling percaya.

Ketika *Agraria Farm* belum berbentuk perseroan terbatas (PT), melainkan baru berwujud komunitas, yang pertama kali dilakukan adalah



investasi di usaha peternakan sapi kurban pada tahun 2017 pada Pelanggan pertamanya. kemudian berikutnya merambah ke user yang bergerak di bisnis lain yaitu peternakan kambing. Agraria farm membiayai user pertama untuk pembelian antara 70-100 kambing.

Dalam upaya menangani permasalahan (*social context*) dalam collaborative governance, para aktor diharuskan untuk berbagi motivasi (*shared motivation*) khususnya untuk menangani permasalahan bagaimana *link and match* antara petani yang tidak memiliki modal dapat bertemu dengan lembaga permodalan. Seperti yang dialami oleh mas Bowo yang berhasil mengakses pinjaman dari Agraria farm, beliau dapat membangun lokawisata yang menggabungkan konsep wisata pertanian dengan wisata alam di daerah Cilegon, mas Bowo memiliki omset berkisar antara lima atau sepuluh milyar. Lokawisata yang dikelola mas Bowo juga menyediakan villa untuk menambah kenyamanan pengunjung.

Selain kisah sukses mas Bowo dalam membangun bisnis lokawisata, ada kisah pak Sarnata yang membangun bisnis bermula dari sewa tanah yang dananya dipinjam dari Agraria Farm, yang sebenarnya sangat *high risk* karena dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, bahkan ada petani-petani lain yang menjadi nasabah Agraria Farm yang hanya mengandalkan system kepercayaan, seperti dalam wawancara Kinda Adam (Wawancara Kinda Adam, 2019):

“Dia sewa. Dia punya lahan dua hektar, terus sewa empat hektar jadi total enam hektar. Kalau di sana biaya sewa nya murah banget. Jadi sistem HGU. Kemaren juga sempat dia menawarkan tanah sekitar 150 juta untuk 1,5 hektar tanah. Kalau di hitung-hitung kan berarti sepuluh ribu per meter persegi. Ada juga, kata dia punya kepala desa yang mau jual. Ada sertifikatnya tapi Cuma fotocopy. Agak beresiko juga tapi, kalau kepala desa kan kadang harus hati-hati juga”.

Selain itu ada Jawara Farm yang dikelola oleh Agis. Cikal bakal Jawara Farm adalah usaha pertanian yang dirintis Agis pada tahun 2013 dengan menanam mentimun, kacang panjang, dan sawi. Ia mulai merasakan beratnya menjadi petani

dengan penghasilan yang baru diterima setiap dua hingga tiga bulan saat panen. Ia berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang lebih rutin. Dari kesemua pengalaman itu Agis mulai merencanakan cara bertani model baru. Yaitu mengatur pertanian dengan melihat peluang pemasukan. Yaitu dengan mem-variatifkan cara bertanam, mulai dari yang per-bulan, tiga bulan dan 6 bulan. Hasil panen hortikultura pertama kali, sekitar 300 kilogram (kg), bisa dipertahankan hingga kini. Panen hortikultura berlangsung setiap tiga bulan. Agis juga merambah budidaya pepaya dengan hasil sekitar 300 kg per bulan. Pendapatan lain diperoleh dari penjualan bibit pepaya, cabai merah, terung, dan tomat. Rata-rata 300 bibit terjual setiap bulan. Namun bisnis yang paling menguntungkan adalah hewan ternak. (Hamid et al., 2020).

Agraria Farm awalnya memberikan pinjaman modal kepada Jawara Farm sekitar 55-60 juta. Setelah berhasil Agrifarm kemudian mendanai jaringan usaha tani yang direkomendasikan Jawara Farm seperti Sarnata untuk menyewa tanah seluas 1.5 Ha untuk menanam jagung manis, Selaras Farm untuk menanam jagung manis, timun, dan oyong; serta seorang petani kambing untuk 50 ekor kambing di daerah Kronjo, Tangerang. Total investasi Agrifarm dalam dua tahun sekitar 2 Miliar rupiah dengan sistem bagi hasil dan tanpa agunan.

Unsur berikutnya dari *collaboration dynamics* adalah kapasitas untuk mengikuti aksi (*Join Capacity*). Apa keunikan yang dimiliki oleh masing-masing aktor sehingga memiliki kapasitas untuk dapat memajukan pertanian di Banten. Dalam kasus ini Agraria Farm memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh *fintech* lainnya, selain berdasarkan kekeluargaan sehingga tidak memerlukan persyaratan yang sulit untuk mengakses pinjaman, Agraria Farm juga tidak menagih bunga dari pinjaman yang diberikan melainkan dengan system bagi hasil sehingga tidak memberatkan bagi petani yang mengakses pinjaman.

Agraria Farm sejak awal didirikan bertujuan untuk menjadi pilihan petani yang tidak ingin berhubungan dengan Bank, karena factor bunga yang tidak sesuai dengan prinsip petani, atau factor Bank yang terlalu kaku dalam menentukan kelaikan nasabah. walau tidak dideklarasikan menggunakan prinsip syariah, akan tetapi pada penerapannya

agraria farm menggunakan metode-metode syariah dalam bisnisnya.

Di awal perusahaan minimal mengambil keuntungan sepuluh persen dari nasabah hanya dalam waktu tiga bulan. Agraria farm memiliki beberapa proyek berdasarkan termin waktu yang berbeda ada proyek tiga, empat, dan enam bulan namun belum ada yang sampai satu tahun. Proyek tersebut sangat bergantung pada tanaman yang akan ditanam atau binatang yang dihasilkan. Tiga bulan itu biasanya kambing kurban, empat bulan itu biasanya jagung, sedang kalau enam bulan untuk cabai. Dari semua keuntungan itu berdasarkan data bahwa pertanian itu keuntungannya paling besar, tetapi risikonya juga besar kalau misalnya ada gagal panen. Pertanian itu kalau untung bisa tiga kali lipat bahkan, misalnya perusahaan invest 90 juta bisa dapat 180 juta lebih. Tetapi risikonya besar karena tergantung sama alam sedangkan perternakan bergantung pada skill petani nya.

Sebagai perusahaan yang menggunakan prinsip syariah, agraria farm harus berhati-hati dalam memilih nasabah, khususnya bila terjadi kerugian pada nasabah yang harus ditanggung juga oleh perusahaan. Untuk menghindari kerugian, agraria farm memeriksa dengan hati-hati profil calon nasabahnya. Tahap pertama untuk mengakses pinjaman dari Agraria Farm adalah dengan proses seleksi, proses ini melihat *track record* dari calon nasabah apakah pernah memiliki permasalahan dengan lembaga keuangan atau tidak. Tahap berikutnya adalah dengan mengirimkan proposal yang merincikan laporan pemasukan, pengeluaran dan besaran bagi hasil yang kemudian akan direview oleh Agraria Farm. Selain tahap—tahap di atas ada rekomendasi yang penting yang juga harus dimiliki oleh calon nasabah. Rekomendasi tersebut biasanya berasal dari nasabah lama yang sudah dipercaya oleh Agraria Farm. Seperti pernyataan Kinda Adam (2019) :

“Iya kadang kita masih tanya ke Mas Bowo, ke Mas Agis. Jadi link-link nya masih di jaga baik. Karena di Banten kalau mau nyari link ya pasti ketemu nya itu-itu lagi”.

Join capacity selanjutnya berasal dari pihak pemerintah, baik pemerintah provinsi Banten ataupun pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi

Banten memiliki berbagai program sesuai dengan kapasitasnya seperti program asuransi hewan ternak, asuransi ini dilatarbelakangi banyaknya kasus kehilangan dan kematian ternak sapi pada saat terjadinya bencana tsunami di Banten. Dalam program ini pemerintah daerah mensubsidi asuransi ternak sapi untuk petani sebesar Rp 160.000, jadi harga asuransi dari sebesar Rp 200.000 per hewan petani hanya disyaratkan membayar Rp 40.000. kompensasi yang diberikan adalah untuk hewan yang dicuri, mati, atau hilang akan mendapatkan paling tinggi sebesar Rp 10.000.000 per hewan. Program lainnya adalah asuransi tanaman padi (AUTP), dalam program ini petani hanya diwajibkan membayar Rp 36.000 untuk satu hektar lahan pertanian. Program asuransi ini untuk menutupi kerugian yang dialami oleh petani beras yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan hama. Kompensasi yang akan diberikan dari setiap kerugian yang dialami adalah Rp 4.000.000 per hektar. Selain kedua program asuransi pemda juga memiliki program lain untuk pertanian di Banten yaitu konseling pertanian, asistensi pembibitan, ternak, pemupukan, dan training menggunakan alat-alat pertanian modern (Wawancara Agus Tauchid, 2019).

Selanjutnya adalah *join capacity* yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok petani muda yang tergabung dalam Jawara farm yang dikelola oleh Agis. Kelompok pertanian ini memiliki kapasitas yang cukup berpengaruh khususnya di Banten, Jawara banyak merekrut petani muda yang tidak memiliki kemampuan dasar di bidang pertanian untuk dilatih menjadi petani yang handal. Pada awalnya ada beberapa mahasiswa yang mencoba magang di Jawara farms dari berbagai universitas seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Pertanian Bogor yang kemudian belakangan bersama Jawara membentuk Komunitas Banten Bangun Desa. Aktivitas mereka berada dalam bisnis agrikultur, dari belajar bagaimana berternak sapi dan kambing, membentuk perencanaan bisnis, pemasaran produk, hingga membuka kesempatan kepada warga desa. Hingga pada tahun 2016 komunitas tersebut telah memiliki ratusan anggota yang tersebar dalam empat desa di Kabupaten Serang

dan dua desa di Kabupaten Pandeglang. (Hamid et al., 2020)

Tabel 3. Pemetaan *Join Capacity* Aktor pertanian di Banten

Kelompok	<i>Join Capacity</i>	Kendala
Swasta, Agraria Farm	Program pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan untuk usaha pertanian	Tidak mendapatkan support dari pemerintah, mendapatkan penjejalan khususnya OJK
Pemerintah, Dinas Pertanian Provinsi Banten	Program Asuransi Ternak dan Asuransi Tanaman Padi	Tidak mendapatkan respon positif petani, sosialisasi program yang kurang baik
Masyarakat Jawara Farms	Program kepada petani muda di Kabupaten Serang dan Pandeglang	Tidak mendapatkan support dari pemerintah karena unsur politik

Sumber: Peneliti 2019

System Context dalam Industri Pertanian Banten

Sebuah *dynamic collaboration* akan selalu dihadapi oleh suatu system yang melingkupi (*system context*) yaitu seperangkat halangan yang harus dapat dilalui oleh para actor kolaboratif untuk menghasilkan suatu *outcome* yang diinginkan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam dunia *fintech* adalah (1). Infrastruktur Infrastruktur yang berbeda di kota dan dipelosok desa menjadi kendala yang begitu tampak nyata. Karena teknologi *fintech* hanya ada pada di l a k u k a n d e n g a n menggunakan akses internet. Jaringan Kontribusi *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian internet yang belum sampai ke pelosok desa-desa tertinggal membuat layanan *fintech* terkendala untuk berkembang. Ilayah banten sendiri secara infrastruktur sudah terakses internet dengan cukup baik berdasarkan data BPS Provinsi Banten menyebutkan bahwa 70.60 persen warga Banten atau sekitar 8.615.422 jia memiliki telepon

seluler, hal ini berbanding dengan penduduk Banten yang berjumlah 12.203.148 jiwa. Pengguna *handphone* yang mengakses internet dari ponsel sebanyak 94.46 persen (Suara.com, 2018).

(2) . Sumberdaya Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap aplikasi teknologi. Terbatasnya kemampuan dalam mengaplikasikan *fintech* membuat penyebaran *fintech* agro menjadi terhambat karena kurangnya nasabah yang menunjang keberlangsungan perekonomian modern. Hal ini menjadi catatan tersendiri dari Agraria farm sebagai pelaku industry, dari berbagai nasabah yang tergabung dalam Agraria farm memang mayoritas berpendidikan S1, seperti Agis dari Jawara yang lulusan S1 FISIPOL UGM dan teman-teman peternak lain yang direkomendasikan oleh Agis memang kebanyakan sudah berpendidikan tinggi. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi *fintech* agar dapat menyentuh masyarakat, khususnya petani muda yang berpendidikan rendah.

(3). Terbatasnya undang-undang yang mengatur *fintech* menjadikan kendala tersendiri dalam penyebarannya. Meskipun OJK telah mengeluarkan PJOK yang mengatur tentang *fintech* namun hal ini masih dirasa kurang. Agraria farm memang mengakui mereka memiliki kesulitan masalah legalitas perusahaan karena bisnis *fintech* yang mereka jalani tidak kunjung mendapatkan ijin dari OJK. Terlebih lagi system bagi hasil yang tidak mengenal bunga yang dijalani tentu akan lebih mempersulit OJK untuk memberikan restu. Hasilnya Agraria Farm mengalami kesulitan dalam pengembangan modal secara umum, karena selama ini hanya mengandalkan system *crowd founding* berdasarkan system kepercayaan (Wawancara Kinda Adam, 2019).

Apabila dilihat dari kinerjanya, *fintech* cukup memiliki peran yang penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, terlebih lagi peran *fintech* dalam menjangkau usaha pertanian yang sudah tidak dapat dilihat sebelah mata. Kontribusi *fintech* terhadap perekonomian di Indonesia dalam bidang pertanian dalam hal ini bagi buruh tani dan pengusaha pertanian sebesar 1.29% dan 1.34%. Dan secara keseluruhan *fintech* memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.45% dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto

lebih dari 60 triliun. Dari sisi serapan tenaga kerja *fintech* dapat menyentuh penyerapan tenaga kerja sebanyak 362 ribu orang dan berkontribusi mengurangi angka kemiskinan sebanyak 177 ribu orang. (INDEF & Indonesia, 2019), jika dilihat

impaknya bagi perekonomian di Indonesia khususnya bagi industry pertanian seharusnya dapat dibuat payung hukum yang dapat menaungi *fintech* khususnya pertanian agar dapat menjadi usaha yang “legal”.



Tabel 4. Dampak *Fintech* P2P Lending Terhadap Institusi Ekonomi

Institusi Ekonomi		Penambahan Pendapatan (miliar rupiah)	Pendapatan Awal (miliar rupiah)	Persentase Perubahan (%)	
Rumah tangga	Buruh tani	2.287.22	176.756.68	1.29	
	Pengusaha pertanian	9.767.10	731.562.84	1.34	
	Pedesaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	5.676.12	494.234.22	1.15
		Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	2.073.81	173.151.85	1.20
		Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU, dan penjualan golongan atas	6.900.07	468.454.50	1.47
	Kota	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	9.552.56	710.495.47	1.34
		Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	3.829.21	243.905.48	1.57
		Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU, dan penjualan golongan atas	14.642.66	827.883.49	1.77
	Perusahaan	32.659.42	1.916.701.71	1.70	
	Pemerintah	14.369.37	1.264.033.42	1.14	
Total	101.757.56	7.007.179.66	1.45		

Sumber : (INDEF & Indonesia, 2019)

(4). Kurangnya pengetahuan pemerintah terhadap keuangan pada masyarakat pedesaan yang belum mengenal *fintech* bagaimana cara menggunakan nya , apa saja manfaat nya , keuntungannya apa saja dan apa tujuannya. (Fitriani, 2018)

Bank Indonesia provinsi Banten aktif dalam memetakan industry pertanian, hal ini dilakukan

untuk mengatasi inflasi yang disebabkan tidak terdistribusinya hasil pertanian serta masalah kredit macet yang sangat rentan terjadi di sektor pertanian. Banyak Bank yang menolak dalam mencover pembiayaan pertanian karena resiko yang terlalu tinggi, sehingga solusinya adalah dengan menggunakan fasilitas keuangan berbasis *fintech* yang lebih ke arah gotong-royong. Namun

permasalahannya adalah di lain sisi pemerintah yang tidak memiliki pengetahuan tentang *fintech* karena masih dianggap “illegal”, dilain sisi juga *fintech* menjadi solusi dari permodalan petani yang tidak dapat dicover oleh Bank.

Sehingga diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan diskusi melalui jaringan petani yang ada di desa-desa, bisa dilaksanakan melalui FGD pada gapoktan yang ada, sosialisasi lewat komunitas-komunitas petani muda, dan sosialisasi melalui media massa dan online. Akibat rendahnya pengetahuan literasi keuangan, membuat masyarakat tidak mempunyai perencanaan dalam pengeolaan keuangan yang baik.

Action dari Agraria Farm

Outcomes merupakan kebijakan yang dihasilkan dari dinamika kolaboratif yang dilakukan oleh aktor-aktor baik sektor publik, privat maupun kelompok masyarakat. Namun sebagai *outcomes* kebijakan tersebut harus teruji terhadap faktor-faktor penghambat, sehingga *outcomes* nantinya akan bersifat adaptif dan tahan terhadap berbagai kondisi (*system context*) yang ada. Kebijakan tidak akan menjadi *outcomes* saat belum dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dan *collaborative governance regime* (CGR) tidak akan tercapai sebelum terciptanya *outcomes*. Dalam konteks Banten, karena belum adanya action yang terjadi diantara para aktor maka CGR tersebut pun belum sampai kepada tahap *outcomes*.

Sampai saat ini, program dari agraria farm belum sampai mempromote petani baru, melainkan untuk memberikan investasi kepada petani yang sudah ada h e r j a l a n u s a h a n y a d a n i n g i n mengembangkan usahanya. selain itu agraria farm juga mencoba mengambil alih peran tengkulak untuk membeli hasil panen petani di desa-desa dengan system yang lebih modern, selain dengan memberi pembiayaan kepada para petani Agraria Farm juga menginginkan dapat membeli produk pertanian dari para petani sehingga petani dapat mendistribusikan hasil panennya tanpa mengalami kesulitan, dan yang terpenting mendapatkan harga yang pantas dengan system cash.

Fokus agraria farm tidak hanya mencover permodalan untuk area Banten saja, melainkan ingin terus meluaskan kiprahnya ke seluruh Indonesia, namun baru tiga provinsi yang sudah

dicover oleh Agraria Farm yaitu Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Sedangkan investornya pun berasal dari berbagai kota seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Agraria farm memiliki pemetaan dalam melihat pasar petani dan peternak khususnya generasi petani muda di Banten. Misalnya melihat daerah mana di Banten yang punya potensi untuk pertanian, atau memang baru sekedar menunggu siapa yang baru mengajukan/merintis usaha pertanian. Menurut pemetaan agraria farm di Banten sebenarnya untuk pertanian ada dua yang potensial. Di pandeglang dan Lebak karena masih banyak terdapat lahan. Untuk anak muda Banten yang ingin terjun ke dunia bisnis itu sulit, kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi anak muda yang ada di Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya karena ada banyak incubator bisnisnya.

Menarik dalam wawancara dengan agraria farm adalah saat sudah banyak capaian yang diperoleh oleh perusahaan yang didirikan oleh para anak muda ini, ternyata tidak ada peran pemerintah dalam bisnis yang dilakukan oleh agraria farm, bahkan mereka menihilkan peran pemerintah, seperti wawancara Kinda Adam (2019) berikut :

“Ga ada. Bener-bener lepas dari peran pemerintah, kita jalan sendiri saja secara swasta. saya juga heran di sini, orang mau maju malah di turunin sama pemerintah bukannya di dorong, akhirnya kita harus ke luar Banten supaya bisa improve. Saya pernah mau bikin PT di Cilegon, itu ribet banget dibanding kita buat di Jakarta, kita hanya bayar 7,5 izin itu beres langsung datang ke Bank dan selesai. Kalau di Cilegon itu banyak banget, harus melewati ini, itu dan segala macam. Jadi orang itu secara hukum dibantu”.

Agraria Farm lebih fokus untuk mencari petani muda karena hanya petani-petani muda lah yang mengerti IT, yang mengerti pembukuan dan lain sebagainya sehingga lebih mudah untuk diawasi laju usahanya, *cashflow* keuangannya, serta lebih mudah untuk diajak berdiskusi untuk kemajuan bersama. Namun dari berbagai kisah sukses agraria farm dalam membantu keuangan para petani, usaha mereka masih sebatas pendanaan

dan belum mencapai pemberdayaan khususnya kepada petani baru. Pendanaan yang diberikan agraria farm berdasarkan dengan keinginan nasabah. apabila nasabah menghendaki untuk selesai, maka nasabah tidak akan dipaksa untuk tetap berhubungan dengan Agraria Farm.

Perbedaan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah dengan yang diberikan oleh agraria terletak pada jaminan, dimana agraria tidak mensyaratkan jaminan di awal dan tidak membebani calon nasabah dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan program pembiayaan dari pemerintah seperti KUR memiliki persyaratan yang sulit, seperti harus ada jaminan dan syarat-syarat lainnya. Sedangkan proses di Agraria Farm, segala persyaratan dokumen pembiayaan dipangkas sehingga dalam waktu empat belas hari kerja pinjaman akan sudah dapat terealisasi.

Menyoal kolaboratif dari agraria sudah memiliki pemetaan (*mapping*) hanya belum sampai pada tahap eksekusi, khususnya untuk pemberdayaan (*empowerment*) para petani sampai ke seluruh Indonesia, menguasai stok pertanian dan juga menguasai pasar. Sedangkan pemerintah hanya akan merespon saat ada permasalahan saja, dan tidak membangun dari awal.

Apabila konsep pemberdayaan sudah dijalankan oleh agraria, maka keseimbangan market akan tercapai dimana kondisi petani selain sudah ada yang menjamin kan dari segi permodalan, komunitasnya pun sudah kuat, jadi distribusi hasil pertanian akan semakin lancar dan petani tidak kesulitan mencari market, seperti Carkokfarm dan Jaffa yang dimiliki oleh Agraria Farm yang berfungsi sebagai jaringan distribusi, Carkokfarm untuk kualitas bagus dengan harga yang murah, sedangkan Jaffa untuk kualitas premium dengan harga yang tinggi.

Ada tiga hal substansial yang cukup menjadi masalah klasik dalam dunia pertanian yaitu bagaimana mencari modal dan bagaimana untuk menyalurkan hasil pertanian sehingga dapat diserap oleh pasar. Menyangkut permasalahan permodalan Agraria farm sudah memberikan solusi, permasalahan selanjutnya adalah masih tradisionalnya system pertanian yang dipakai mayoritas petani di Indonesia, petani tidak memiliki

inovasi baru untuk memecahkan masalah ketidakpastian cuaca, hama penyakit, dan persoalan social ekonomi pertanian. Sedangkan untuk permasalahan terakhir adalah penyaluran hasil pertanian membutuhkan peran dari multisector. Selama ini dari pemerintah mengandalkan BULOG, akan tetapi permasalahannya adalah BULOG seringkali turun terlambat kalah cepat dari tengkulak, permasalahan lain adalah tengkulak berani membayar untuk gabah kualitas jelek sedangkan BULOG mematok kriteria tertentu untuk jenis gabah yang menyulitkan petani.

Agraria farm mendorong adanya BUMD sebagai solusi untuk memecahkan masalah distribusi hasil pertanian sekaligus membantu memberdayakan petani-petani di daerah. namun BUMD masih terbatas dalam hal keuangan karena masih ada peran pusat atau swasta dalam pendanaannya sehingga belum dapat maksimal dalam pemberdayaan masih diupayakan oleh orang-orang yang tergabung dalam kelompok tani secara swadaya, dan mereka bekerjasama dengan Agraria Farm sebagai pendanaan. (Wawancara Kinda Adam, 2019)

Agraria farm sebagai sector privat pernah berencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten di bidang Agrowisata. Dengan konsep pemerintah meminjamkan lahan di daerah KP3B, kemudian Jawara Farm sebagai peternak indukan pemilikan konsep Agrowisata mengumpulkan semua peternak di KP3B, sedangkan Agraria Farm yang akan mengurus pemasarannya. Akan tetapi konsep tersebut tidak disetujui oleh pemerintah Provinsi Banten.

Belum terlihatnya peran pemerintah daerah untuk memberdayakan petani dapat dilihat dari alih fungsi lahan yang massif dijadikan sebagai perumahan baru, sehingga justru menambah sulit pertumbuhan petani di Banten, selain itu pemerintah belum mampu menjadi perantara antara produsen dan konsumen sehingga petani sulit untuk mendistribusikan hasil pertanian mereka.

Permasalahan ini tidak semata peran pemerintah daerah, melainkan *blue print* pembangunan nasional pemerintah pusat yang memang mengurangi secara drastis lahan pertanian

dan akan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan sesuai program pengadaan 1 juta rumah dan proyek-proyek mercusuar lain seperti pembangunan jalan tol dan waduk dari pemerintah pusat, khususnya yang terletak di Banten, akhirnya kawasan hijau pun tidak lepas dari pengurusan dan alih fungsi lahan. Pemerintah daerah melalui dinas pertanian berupaya untuk mengusahakan lahan pertanian tidak berkurang secara drastis melalui jalur legislative (Wawancara Agus Tauchid, 2019).

Provinsi Banten belum memiliki sektor swasta yang fokus untuk pembiayaan sektor pertanian, serta melakukan mapping terhadap generasi muda yang terjun ke usaha pertanian. Sedangkan Agraria farm telah memiliki roadmap pertanian yang dijalankan oleh anak muda, serta memiliki resources untuk memberdayakannya. Misalkan dalam kasus apabila petani kesulitan masalah irigasi, maka akan dicarikan jalan keluar oleh Agrafarm. Seperti pada kasus pertanian di Pandeglang yang memiliki masalah irigasi yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan komunitas petani.

Agraria Farm pun menangkap kecemasan dari Kepala Dinas Pertanian Banten terkait permasalahan lahan-lahan urban yang sudah dinolkan untuk lahan pertanian, seperti kota Tangerang dan kota Tangsel, yang membuat pertanian yang ada di kedua kota tersebut sangat sulit untuk berkembang karena prioritas dibuat sebagai perumahan. Akhirnya pemerintah menjadi buah simalakama, dilain sisi mendapatkan masukan kas dari pajak daerah dari perumahan tersebut kemudian aktivitas usaha permukiman tadi pula melahirkan perputaran uang. Sehingga lahan pertanian itu tersisa tinggal Kabupaten Serang, Pandelang, dan Lebak. Sedangkan pertanian khususnya petani padi tidak memiliki produk khas yang dapat dijadikan komoditas unggul (Wawancara Kinda Adam, 2019)

Terkait permasalahan berkurangnya lahan pertanian di Provinsi Banten dibenarkan oleh Agus Tauchid Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bahwa alih fungsi lahan pertanian, kenyataannya sekarang hampir semua Bupati dan Walikota di Banten ingin mengadakan revisi RT/RW, karena di beberapa wilayahnya rata-rata

ingin mengurangi lahan persawahannya, yang lebih ekstrim lagi kota Tangsel dan Tangerang yang ingin hilang lahan sawahnya menjadi 0 persen. Data terbaru dari hasil ATR BPN di kota Tangerang masih ada sawah sekitar 1000 hektar tetapi ingin dikurangi sampai 0 persen (Wawancara Agus Tauchid, 2019).

Outcomes dari collaborative governance dalam pertanian di Banten memang belum menemukan hasil, akan tetapi masing masing actor dari permasalahan pertanian di Banten sudah menuju ke arah yang sama sehingga tinggal perlu dipertemukan dan dibicarakan pembagian peran dari masing-masing actor sehingga tidak saling bentrok dan tumpang tindih melainkan selaras dalam menuju outcomes dari kebijakan yang akan berdampak luas tersebut.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Peran fintech tidak dapat dipungkiri dapat membantu menginisiasi petani muda di Banten, seperti peran fintech Agraria farm yang dapat menjadi penyokong pendanaan dari Jawara farm milik Agis di Serang, Lokawisata milik Bowo di Cilegon, Selaras Farm milik Rizky di Pandeglang dan lainnya. Hal ini merupakan sebuah terobosan saat permasalahan aging generation dari industri pertanian sedang mencuat, dengan hadirnya fintech dapat menjangkau generasi muda dalam merajut bisnis pertanian.

Namun tidak berjalan seperti seharusnya, kolaborasi antara fintech sebagai pihak swasta dengan pemerintah tidak berjalan mulus. Fintech beranggapan bahwa pemerintah justru mempersulit langkah mereka, sebagaimana pihak petani muda yang juga tidak merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh public sector masih belum melibatkan sektor swasta dan kelompok petani sehingga kebijakan yang dikeluarkan bersifat top down.

Fintech sendiri mengakui masih sebatas melakukan mapping terhadap petani-petani yang ada di Banten dan belum pada tahap pemberdayaan, semestinya di sini pemerintah masuk dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti

pelatihan dan pendampingan usaha sampai proses distribusi hasil pertanian sehingga kebijakan dapat dirasakan utuh oleh semua *stakeholder* yang ada di bidang pertanian khususnya di Banten.

Inovasi juga merupakan hal yang masih dilupakan di dalam dunia pertanian, petani belum memiliki konsep pertanian modern seperti *one stop industry* dimana produksi dari hulu ke hilir bisa dikuasai sehingga dapat memangkas biaya-biaya dan menerapkan efisiensi. sehingga harga produk dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Agraria farm telah menciptakan tonggak inovasi dalam dunia pertanian sehingga dapat memangkas *aksesibility* para petani generasi muda terhadap modal sehingga permasalahan modal bukan lagi menjadi halangan untuk memulai terjun di dunia pertanian. Hanya saja belum ada inovasi bagaimana mempermudah dalam distribusi hasil pertanian, sehingga dapat memutus mata rantai yang panjang yang merugikan petani. Hal ini mau tidak mau membutuhkan kerjasama antar actor dalam rangka *collaborative governance*.

Rekomendasi

Perlu ada pembagian peran yang signifikan antara aktor-aktor yang berperan dalam permasalahan pertanian di Banten, sebagaimana masing-masing actor memiliki kapasitas untuk bergabung dalam suatu isu yang sama, masing-masing mereka juga telah memiliki kualitas dalam menghadapi segala hambatan (*system context*) dalam dunia pertanian sehingga masing-masing aktor dapat melakukan aksi (*action*) dalam sebuah outcome *collaborative governance* tanpa merasa dijegal oleh aktor yang lain, juga untuk meningkatkan efektivitas program agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

REFERENSI

- Ansell, Cris and Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal JPART*, 18, 543–571.
- Avisha, A., Charina, A., Noor, T. I., & Mukti, G. W. (2019). Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian (Studi

Kasus Di Pt Crowde Membangun Bangsa). *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5 (1) , 1 .
<https://doi.org/10.25157/ma.v5i1.1571>

- BPS Povinsi Banten. (2013). *Sensus Pertanian 2013*.
- BPS Provinsi Banten. (2016). *Sensus Pertanian 2016*.
- BPS Provinsi Banten. (2018). *Nilai Tukar Petani 2018*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina and Balogh, S. (2011). An Integrative framework for Collaborative Governance. *Journal JPART*, 22, 1–29.
- Emerson, Kirk and Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Fitriani, H. (2018). KONTRIBUSI FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA PERTANIAN (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (1) , 1 . <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>
- Hamid, A., Nurrohman, B., Hikmawan, D., & Ramadhan, G. (2020). *The Rise of Young Entrepreneurial Farmers in Banten , Indonesia*. 24(10), 1794–1807.
- INDEF, & Indonesia, A. F. (2019). *Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional*. 1–13.
- Junainah, W., Kanto, S., & S. (2016). Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan,. *Wacana*, 19(3), 148–156.
- lipi.go.id. (2015). Minat Bertani Generasi Muda



Menurun, Indonesia Terancam Krisis Petani. Retrieved from <http://lipi.go.id/berita/single/Minat-Bertani-Generasi-Muda-Menurun-Indonesia-Terancam-Krisis-Petani/10836>

Lynn, Theo, John G. Mooney, Pierangelo, Rosati, M. C. (2019). Disrupting Finance FinTech and Strategy in The 21st Century. In *Palgrave Macmillan*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02330-0_3

Petani Muda. (2019). No Title. Retrieved from www.petanimuda.org

Suara.com. (2018). Pengguna Internet di Banten.

Tirto. (2019). No Title. Retrieved from www.tirto.id

Wawancara Agus Tauchid. (2019). *Wawancara*.

Wawancara Kinda Adam. (2019). *Wawancara*.